



# Guru Abdi Digaji ✓ Rp 300 Ribu Per Bulan

Singaraja (Bali Post)-

Dunia pendidikan di Buleleng kurang apresiatif terhadap guru kontrak dan guru mengabdikan. Realitas itu terjadi di salah satu sekolah di Kubutambahan. Bukan saja hanya mendapat gaji Rp 300 ribu, gaji guru yang mengabdikan seringkali mandek. Baru diberikan setelah dua hingga tiga bulan sekali. Padahal peran guru sebagai pahlawan tanda jasa tidak pernah surut mendidik siswa-siswi sebagai pelita penerus bangsa.

Dua guru mengabdikan di kelas jauh SD 2 Tunjung, Banjar Dinas Tonggak, Desa Tunjung, Kubutambahan. Ni Made Ari Devi Yanti (28), bekerja sebagai guru abdi. Ia memperoleh pendapatan Rp 300 ribu per bulan. Nilai upah tersebut jauh di atas rata-rata UMR Buleleng Rp 1.650.000. Padahal untuk ke sekolah ia menempuh jarak pulang-pergi sejauh enam kilometer. Setibanya di sekolah ia mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia pada kelas I, IV, V dan kelas VI. Harapannya kepada pemerintah agar mencarikan solusi terhadap nasib guru abdi di desa. Setidaknya nilai upah guru ke depan mampu memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. "Kalau di rumah saya buka warung kecil-kecilan. Profesi guru abdi sudah setahun ini saya dilakoni, karena sudah telanjur berkecimpung di dunia pendidikan. Pakai beli bensin saja uangnya sudah habis. Supaya nanti ada perhatian lebih dari pemerintah, agar bisa diangkat jadi guru kontrak saja sudah bersyukur," ujar Devi Yanti, alumni Jurusan PGSD Undiksha Singaraja tahun 2007.

Guru abdi lainnya, Ni Ko-

mang Warniki, sehari-hari mengajar olahraga. Sedangkan lima guru yang sudah dikontrak adalah I Made Mustawan, I Nyoman Gunastra, I Made Sujana Arta, Ni Made Astiti Ningsih, dan termasuk penjaga sekolah I Ketut Carma. Untuk guru kontrak digaji Rp 1 juta.

Kepala SD 2 Tunjung Made Arca berbeda lagi. Ia kesehariannya mengurus dua sekolah sekaligus, ia bertugas di induk SD 2 Tunjung di Banjar Dinas Penulisan, Kubutambahan dan kelas jauh berada di SD 2 Tunjung di Banjar Dinas Tonggak, Kedua sekolah itu berjarak tujuh kilometer. Rata-rata setiap kelas berisi 26 murid. Sekolah telah memiliki enam ruangan kelas representatif. Belakangan hanya membutuhkan rehab perpustakaan sebagai ruang membaca siswa-siswi.

Salah satu guru kontrak bernama I Made Mustawan mengatakan, pendapatan upah sebulan dari mengajar pelajaran Agama Hindu Rp 1 juta. Sejak mengajar lima tahun terakhir, ia sempat menerima upah Rp 500 ribu di tahun 2009. Beruntung tahun ini gajinya dinaikkan. Upah yang diterima kini masih tergolong terbatas. Ia lalu mengambil

pekerjaan sampingan, yakni memelihara ternak sapi dan babi. "Kalau jam kerja sama seperti pegawai biasa 8 jam. Pendapatan upah yang minim, ya... terpaksa sayaukupi untuk istri dan dua anak saya di rumah," ucapnya.

Mustawan menuturkan, SD 2 Tunjung idealnya membutuhkan enam guru kelas, satu guru agama dan satu guru olahraga. Ia kini bahkan merangkap jabatan mengajar sebagai guru agama, guru Bahasa Bali dan guru wali kelas VI. "Sekarang belum memadai seluruhnya. Kalau jumlah siswa kami di SD 2 mencapai 126 orang di kelas jauh, dan masing-masing kelas berisi 26 siswa-siswi," tuturnya.

Banyak yang berpendapat bahwa upah Rp 300 ribu bagi guru abdi sangat tidak manusiawi. Dari info yang diperoleh, Pemkab hanya bisa mengangkat guru kontrak sangat terbatas. Anggaran upah guru kontrak dari Disdik Buleleng melalui APBD Rp 8 miliar setahun. Faktanya sekarang guru kelas di Buleleng memang kurang lagi 1.824 orang, khusus guru tingkat SD tersebar di seluruh kecamatan. Guru kontrak di Buleleng kurang lebih ada 700 orang. (kmb34)

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 11



Pemungutan Belum Secara "Online"

## Badung Kehilangan

# Potensi PHR Rp 3,2 Triliun

Mangupura (Bali Post) -

Lantaran belum dilakukan pemungutan secara *online*, pendapatan Kabupaten Badung yang dominan berasal dari sektor pariwisata belum menghasilkan maksimal. Bahkan, Komisi III DPRD Badung memprediksi Gumi Keris kehilangan potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Rp 3,2 triliun. "Dengan perhitungan tingkat hunian hotel hanya 25 persen serta *rate* dolar hanya Rp 10.000, potensi PHR Badung mencapai Rp 6 triliun," ujar Ketua Komisi III, Nyoman Satria, saat ditemui di gedung dewan, Kamis (8/10) kemarin.

Dengan begitu, Nyoman Satria menyebutkan kehilangan potensi PHR Badung selama ini mencapai Rp 3,2 triliun, karena pendapatan asli daerah (PAD) Badung saat ini baru Rp 2,8 triliun. Angka itu diperoleh dari jumlah kamar 10.000 saja dikalikan *room rate* dikalikan 10 persen. "Itu hitung-hitungan sederhana dan kami memperoleh angka tersebut," ungkapnya.

Untuk menekan kebocoran potensi pajak, DPRD Badung saat ini gencar merancang ranperda pajak *online*. Salah satu tujuannya, untuk meminimalkan *lost* pajak serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan penerapan pajak *online* ini, pihaknya merancang peningkatan PHR hingga Rp 500 miliar pada 2016 dan Rp 500 miliar pada 2017. "Dalam dua tahun ke

Edisi : Jumat, 3 October 2015

Hal : 3



depan, kami menargetkan PHR meningkat hingga Rp 1 triliun," katanya.

Terkait pemasangan *typing box* yang telah dilakukan di beberapa objek pajak, menurut Satria, hal itu belum merupakan penerapan pajak *online* secara penuh. "*Typing box* masih dioperasikan secara manual. Bisa saja transaksi yang terjadi tidak dimasukkan secara penuh," ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskannya, sasaran lainnya dari pajak *online* ini adalah banyaknya transaksi yang diselesaikan di luar negeri, termasuk uangnya. Misalnya, tamu-tamu dari Korea telah melakukan transaksi hotel, restoran, hiburan, dan perjalanan di Korea. Karena itu, Bali hanya memberikan pelayanan kepada tamu-tamu tersebut. Transaksi seperti ini banyak *lost* dari pajak. "Ini akan men-

jadi atensi kami lewat Pansus Pajak Online ini," tegasnya.

Disebutkannya, saat ini pansus telah terbentuk dan dipimpin oleh salah satu anggota Komisi III, yakni Ketut Subagia. Selanjutnya, pansus akan menggelar studi banding dan melakukan kajian real PHR bekerja sama dengan sejumlah universitas di Bali. Kendati demikian, banyak kendala yang akan dihadapi di lapangan. Misalnya, objek studi banding. "Jakarta yang selama ini dikatakan sudah menerapkan pajak *online*, ternyata belum, apalagi daerah lainnya. Karena itu, tak tertutup kemungkinan pansus akan studi banding hingga ke luar negeri," jelasnya seraya menambahkan, Badung akan menerapkan tiga sistem pajak secara simultan yakni manual, *typing box*, dan pajak *online*. (kmb27)

Edisi : Jumat, 3 Oktober 2015

Hal : 3



## Pj. Bupati Tinjau Proyek Fisik di Mengwi dan Abiansemal

SEJUMLAH proyek fisik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2015, Kamis (8/10) kemarin, ditinjau Penjabat (Pj.) Bupati Badung Ir. I Nyoman Harry Yudha Saka, M.M. Peninjauan ini guna memastikan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik, sekaligus mengevaluasi jika ditemukan pengerjaan yang tidak sesuai dengan DED.

Pj. Bupati Yudha Saka didampingi Kabag Pembangunan A.A. Bayu Kumara serta SKPD terkait, mengawali peninjauan pembangunan Gedung Koperasi yang berada di kawasan Puspem Badung. Gedung dengan nilai kontrak Rp 9,3 miliar lebih ini, selain dimanfaatkan untuk kantor pelayanan Koperasi Bina Sejahtera Badung, juga terdapat ruang untuk pameran hasil kerajinan dari Disperindagkop Badung. Bangunan ini dikerjakan PT Karya Ananda dengan pelaksanaan 240 hari kalender.

Masih di kawasan Puspem, Pj. Bupati juga meninjau pembangunan Gedung Aset yang berada di selatan Puspem. Proyek senilai Rp 4 miliar lebih itu sudah hampir selesai. Gedung Aset nantinya akan digunakan untuk menaruh aset-aset seperti mobil dan sepeda motor, termasuk barang elektronik. Di sana juga dilengkapi bangunan untuk tempat lelang.

Dari Puspem, Pj. Bupati melanjutkan peninjauan ke



**PROYEK - Sejumlah proyek fisik yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun 2015, Kamis (8/10) kemarin ditinjau Pj. Bupati Badung Ir. I Nyoman Harry Yudha Saka, M.M.**

pembangunan RKB SD No. 1 Lukluk. Proyek senilai Rp 1,2 miliar lebih ini dikerjakan CV Perama Dewata. RKB yang berlantai 2 ini dilengkapi masing-masing dua ruang belajar dan lantai satu dapat juga difungsikan sebagai aula. Selain proyek tersebut, Pj. Bupati juga meninjau peningkatan jalan lingkungan permukiman Kelurahan Lukluk, rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Mengwi yang berlokasi di Desa Pendarungan, pembangunan trotoar simpang Abiansemal-Blahkiuh, penataan objek wisata Mumbul di Desa Sangeh dan pembangunan Kantor Camat Mengwi.

Khusus proyek kantor camat sebagai tempat pelayanan

umum, mendapat atensi lebih dari Pj. Bupati Yudha Saka. Proyek dengan nilai kontrak Rp 7,4 miliar lebih tersebut mengalami peningkatan, dari target 59,100 % terealisasi 61,170 persen. Proyek ini dikerjakan PT Karya Bali Utama Perkasa dengan waktu 240 hari kalender. Di sana Pj. Bupati meninjau satu per satu ruangan kantor, baik bangunan untuk pelayanan maupun bangunan kantor camat yang berlantai 3 tersebut. Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati menekankan kepada pelaksana proyek maupun pengawas untuk memerhatikan kualitas bahan bangunan yang dipergunakan serta waktu pengerjaan proyek tersebut. (ad539)

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 2



## Retribusi Terminal Lampau Target

Singaraja (Bali Post) -

Retribusi terminal di Buleleng hingga pertengahan tahun ini realisasinya melebihi target. Tahun 2015 ini Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng ditarget menyertorkan PAD dari retribusi terminal sebesar Rp 60 juta. Hingga bulan ini realisasinya Rp 76.639.000. Menariknya, PAD itu terealisasi melebihi target setelah Dishub mengoptimalkan Terminal Penarukan sebagai pos pungutan retribusi bagi kendaraan truk pengangkut material, kendaraan pengangkut barang dan kendaraan penumpang umum.

Kepala Dishub Buleleng Gede Gunawan A.P. di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Buleleng, Kamis (8/10) siang kemarin mengatakan, dari lima terminal yang dikelola Dishub Buleleng hanya Terminal Penarukan yang mampu menghasilkan PAD lumayan besar. Sementara terminal lain seperti Banyuasri kini terbagi menjadi pasar tumpah, sehingga kontribusi PAD-nya kecil. Apalagi, Terminal Seririt yang sekarang hanya

tinggal nama. Faktanya saja terminal, saat ini sudah dijadikan areal pasar darurat. Terminal bongkar muat barang kini dalam tahap pengaspalan juga ditutup karena tidak mampu menghasilkan retribusi. Hanya Terminal Sangket dan Terminal Pancasari hidup dan penghasilannya tak sebarapa. "Hanya Terminal Penarukan yang efektif dan hanya dari sana target PAD kami terealisasi melebihi target," katanya.

Khusus kendaraan pengangkut barang yang diarahkan masuk ke Terminal Penarukan, kata Gunawan, nilai retribusinya ditentukan berdasarkan Jumlah Beban Angkut (JBB) dari kendaraan itu sendiri. Nilai retribusinya pun paling rendah Rp 3.000, Rp 5.000 dan paling mahal Rp 7.000 untuk satu kali masuk terminal. Nilai retribusi seperti ini saja sudah mampu menghasilkan pemasukan lumayan. Jika potensi ini dikelola lebih serius, pihaknya optimis akan menghasilkan PAD lebih besar lagi. Untuk itu, pihaknya tahun 2016 mendatang telah menyusun

program kerja untuk menata kembali kerusakan areal Terminal Penarukan.

Atas keberhasilan Dishub tersebut, Ketua Komisi II DPRD Buleleng Mangku Putu Budiasa menyambut positif kerja keras yang sudah dilakukan Dishub. Usulan untuk menata terminal yang mengalami kerusakan mendapat apresiasi dan pihaknya setuju perbaikan itu disusulkan pada APBD Induk 2016 mendatang. Dukungan fasilitas yang memadai sudah menjadi kewajiban pemerintah setelah para sopir truk atau kendaraan penumpang umum membayar retribusi kepada pemerintah. (kmb38)

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 11



## Usulan Dana Pilkada Rp 46,8 Miliar Dewan Tawarkan Anggaran Bertahap

Singaraja (Bali Post) -

Proposal anggaran Pilkada Buleleng mencapai Rp 46,8 miliar. Usulan itu mulai disikapi lembaga dewan. Alokasi anggaran yang membengkak dari keperluan anggaran pilkada 2012 lalu membuat wakil rakyat di Buleleng mulai "memeras otak" agar kebutuhan anggaran itu terpenuhi.

Dewan kemudian menawarkan total rencana kebutuhan anggaran itu diusulkan bertahap selama dua tahun anggaran yakni APBD Induk 2016 dan 2017. Dewan juga masih melakukan pengkajian usulan itu, yakni mencari alokasi anggaran yang bisa dirasionalisasikan. Tujuannya, agar bisa menghemat keuangan.

Hal itu mengemuka pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisiner KPU dengan Komisi I DPRD, Kamis (8/10) kemarin. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I H. Mulyadi Putra didampingi Sekretaris Komisi Wayan Teren dan anggotanya. Dari komisioner KPU dipimpin ketuanya Gede Suardana.

Rapat diawali penyampaian secara garis besar proposal kebutuhan biaya untuk menunjang pelaksanaan pilkada yang dihelat Februari 2017 mendatang. Dari proposal itu, KPU membutuhkan total anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp 46,8 miliar. Dana sebesar ini untuk membiayai tahapan pilkada yang berlangsung selama dua bulan ke depan. Dari perkiraan kebutuhan anggaran itu, biaya membayar honorarium dan lembur cukup tinggi yakni Rp 22,5 miliar. Selain itu, biaya pengadaan hingga Rp 24,3 miliar. Biaya honorarium sementara ini masih menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan (permenkeu-red). Menunggu permenkeu itu untuk sementara KPU merancang kenaikan honorarium penyelenggara pilkada. Hal ini dilakukan sesuai besaran hono-

rarium penyelenggara pada pemilu sebelumnya dan pertimbangan laju inflasi selama dua tahun terakhir. Untuk itu, nilai honorarium penyelenggara di tingkat bawah itu dirancang untuk dinaikkan. Kenaikan itu mulai dari PPK yang semula Rp 1.250.000 dalam pilkada dinaikkan menjadi Rp 2 juta. Honor KPPS sebelumnya Rp 500.000 naik menjadi Rp 750.000 dan PPS semula dibayar Rp 300.000 dinaikkan menjadi Rp 350.000. Kenaikan honorarium ini tidak

mutlak dan bisa saja berubah tergantung instruksi permenkeu yang akan diperkirakan segera terbit.

### Dianggarkan Dua Kali

Menganggapi presentasi kebutuhan anggaran tersebut, Sekretaris Komisi I Wayan Teran mengusulkan kemungkinan untuk membagi usulan penganggaran dana pilkada tersebut. Biasa saja tahun 2016 dianggarkan setengahnya dan kekurangannya kembali diusulkan tahun 2017 mendatang. Usulan menganggarkan dana pilkada secara bertahap itu mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah di tahun 2016 yang masih melanjutkan pembangunan fisik di wilayah perkotaan. Kewajiban untuk menyiapkan dana pilkada ini cukup menyedot anggaran, sehingga dalam mengantisipasi agar program pembangunan tak mandek, dirinya mengusulkan dana pilkada dianggarkan dua kali.

Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, sesuai kajian dan pertimbangan saat menyusun proposal itu pihaknya menyusun anggaran pilkada dalam satu paket dengan jumlah perkiraan Rp 46,8 miliar. Anggaran ini diharapkan bisa diusulkan satu tahun anggaran yakni pada APBD Induk 2016. Alasannya, mengapa satu paket dan satu kali pengusulan, karena tahapan pilkada mulai digeber Februari

2017. Bahkan, pertengahan tahun 2016 ini KPU sudah memerlukan anggaran untuk membiayai kebutuhan tahapan pilkada. Yang paling krusial lagi Januari 2017 KPU harus sudah menyiapkan anggaran untuk logistik maupun membiayai *ad hoc* penyelenggara pilkada. Atas kondisi ini, Suardana mengaku waswas kalau menyangkut anggaran pilkada yang belum siap, maka situasi ini bisa saja akan dimanfaatkan pihak tertentu yang melakukan

upaya menghambat apalagi sampai menunda pelaksanaan pilkada. Selain proposal anggaran pilkada yang diajukan KPU, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kabarnya Bawaslu sendiri memerlukan anggaran Rp 10 miliar. Sementara untuk dana pengamanan dari kepolisian direncanakan melan anggaran Rp 9 miliar. (kmb38)



Bali Post/kmb38  
PRESENTASI - Ketua KPU Buleleng Gede Suardana (tengah) saat mempresentasikan proposal anggaran kebutuhan dana pilkada kepada Komisi I DPRD Buleleng, Kamis (8/10) kemarin.

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 11



# Dana PKH Tahap Ketiga Dicairkan

**Gianyar Digelontor Rp 960 Juta Lebih**

**Gianyar (Bali Post) -**

Dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga di Kabupaten Gianyar mulai dicairkan. Untuk tahap ketiga, total dana yang akan diserahkan senilai Rp 960.373.750 kepada 2.836 Keluarga Sangat Miskin (KSM)

atau peserta PKH se-Kabupaten Gianyar. Pencairan dilakukan secara bertahap per kecamatan yang dimulai Kamis (8/10) kemarin di Kecamatan Gianyar.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar I Wayan Suardana mengungkapkan,

pencairan dana bantuan program pemerintahan Jokowi lewat Kementerian Sosial ini merupakan upaya pemerintah mengurangi dan memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencairan tahap ketiga dilakukan secara



Bali Post/ded

**VERIFIKASI - Proses verifikasi pencairan dana PKH tahap ketiga di Kantor Pos Gianyar, Kamis (8/10) kemarin.**

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 9



Sambungan - - -

bergilir di kantor pos masing-masing kecamatan mulai kemarin hingga 16 Oktober sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Rincian dana PKH per masing-masing kecamatan yakni Kecamatan Gianyar sebanyak 634 penerima dengan jumlah bantuan Rp 229.162.500, Kecamatan Ubud sebanyak 368 KK atau Rp 117.837.500, Kecamatan Sukawati sebanyak 240 penerima dengan jumlah dana Rp 84.462.500, Kecamatan Blahbatuh dengan 152 penerima dengan jumlah dana Rp 61.361.250, Kecamatan Tegallalang 653 penerima dengan jumlah bantuan Rp 214.600.000, Kecamatan Tampaksiring dengan 345 penerima dengan bantuan dana Rp 138.125.000, dan Kecamatan Payangan sebanyak 444 penerima dengan bantuan dana Rp 138.125.000.

Dikatakannya, besaran dana bantuan untuk PKH ta-

hap ketiga disesuaikan dengan kategori penerima bantuan. Untuk tingkat SD sebesar Rp 450.000 per orang, per tahun. Kemudian SMP Rp 750.000 per tahun dan SMA sebanyak Rp 1 juta per tahun. Khusus untuk ibu hamil atau nifas atau balita mendapat bantuan Rp 1 juta per tahun.

"Jumlah penerima bantuan setiap tahapan bisa berbeda, karena kemungkinan terjadi pergeseran kondisi seperti yang SD sudah naik ke SMP atau ibu hamil sudah melahirkan bantuan dialihkan menjadi bantuan balita," tambahnya.

Salah satu penerima bantuan, Ni Komang Suidani, mengungkapkan, pihaknya merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Dia pun berharap bantuan semacam ini dapat terus berlanjut, karena dinilai bermanfaat bagi keluarga kurang mampu. (kmb25)

### Rincian Dana PKH per Kecamatan

Kecamatan Gianyar	: 634 KK - Rp 229.162.500
Kecamatan Ubud	: 368 KK - Rp 117.837.500
Kecamatan Sukawati	: 240 KK - Rp 84.462.500
Kecamatan Blahbatuh	: 152 KK - Rp 61.361.250
Kecamatan Tegallalang	: 653 KK - Rp 214.600.000
Kecamatan Tampaksiring	: 345 KK - Rp 138.125.000
Kecamatan Payangan	: 444 KK - Rp 138.125.000.



## Hibah Tak Kunjung Cair

# Dewan Ancam Kerahkan

# Massa dan Boikot Pembahasan APBD

### Mangupura (Bali Post) -

Kisruh soal pencairan dana hibah di Badung terus memanas. Bahkan, lantaran tak ada kejelasan hingga kini, kalangan DPRD Badung mengancam akan mengerahkan ribuan massa ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

"Saya rasa kalau semua warga yang mengajukan proposal itu datang ke kantor bupati, maka Puspem itu akan penuh. Ribuan orang akan datang. Kalau perlu, saya suruh itu warga menginap di kantor bupati," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra, Nyoman Sentana, saat dimintai konfirmasi, Kamis (8/10) kemarin.

Menurutnya, selain menggalang mosi tidak percaya kepada eksekutif, dewan juga memberikan *deadline* pada eksekutif. Apabila dalam waktu seminggu dana hibah tidak juga cair, maka

Sentana dan anggota dewan lain akan menyuruh warga pemilik proposal hibah datang ke kantor bupati. "Intinya, kami beri *deadline* seminggu," tegasnya.

Kalangan wakil rakyat pun mengancam memboikot pembahasan APBD 2016. Ini lantaran selama ini Penjabat (Pj.) Bupati Badung dan Sekkab dinilai sengaja menghambat pencairan hibah. Pasalnya, berdasarkan hasil konsultasi dengan Pemrov Bali, hibah bisa cair asal ada Peraturan Bupati (Perbup). Namun, Pj. bupati tak kunjung membuat Perbup itu. "Kami dewan ini sudah tidak punya muka lagi di masyarakat. Kami selalu ditodong hibah. Hibah itu bukan untuk dewan, tapi untuk rakyat. Kami hanya memfasilitasi," ucap politisi asal Blahkiuh, Abiansemal ini.

Menanggapi ancaman tersebut, Kabag

Humas Pemkab Badung A.A. Raka Yuda meminta agar dewan bersikap bijaksana dalam melakukan sesuatu. "Saya kira ancaman itu perlu dipikirkan ulang. Apakah hal itu termasuk bijaksana atau tidak? Semua harus disikapi dengan dewasa agar semua dalam kondisi aman," katanya.

Dia mengakui, Pemkab Badung masih terus mencari formula agar permasalahan hibah bisa dicarikan jalan keluar. Eksekutif dan tim ahli sudah berkali-kali melakukan rapat untuk mencari solusi terbaik. "Untuk hibah, akan dikaji pencairannya. Apabila proposal hibah yang diajukan berupa bangunan, maka bisa dialokasikan dalam kegiatan eksekutif. Kami eksekutif juga terus berusaha agar masalah ini selesai, tapi tidak sampai masuk ke ranah hukum," ujarnya. (kmb27)

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 3



## Kasus Dugaan Korupsi Bansos Pusat Dilimpahkan ke Kejaksaaan

**Tabanan (Bali Post) -**

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, kasus dugaan korupsi dana bansos Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan akhirnya tuntas. Penyidik Polres Tabanan telah menetapkan satu tersangka dugaan korupsi Dana Bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) 2012 atas nama Drh. I Gusti Made Putra Adiyasa (37) asal Banjar Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel. Oleh karena berkas sudah lengkap, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Tabanan, Kamis (8/10) kemarin. Kasi Pidsus Kejari Tabanan Fatur Rochman membenarkan pihaknya sudah mendapat pelimpahan tahap II terkait kasus korupsi dana bansos pusat tersebut. Baik tersangka maupun barang bukti sudah diterimanya. "Tersangka selanjutnya kami titipkan ke LP Tabanan," ujarnya.

Kini pihaknya mempersiapkan administrasi untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Denpasar, paling lambat dua minggu. Kasus dugaan korupsi dana bansos pusat sebesar Rp 150 juta ini terjadi pada 2012 silam. Kasus ini berawal ketika pemerintah memperkenalkan program SMD melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian RI dengan menggandeng kelompok tani Mekar Sari. Rencananya, dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha kelompok ayam. Setelah dilakukan seleksi secara bertahap mulai dari seleksi penilaian proposal, tes tulis, wawancara sampai verifikasi kelompok yang dilakukan tim seleksi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Fakultas Peternakan Unud dan Dinas Peternakan Provinsi Bali, tersangka dinyatakan lulus.

Dana akhirnya cair secara bertahap, dengan rincian tahap pertama 11 Juli 2012 sejumlah Rp 60 juta, tahap kedua 30 November 2012 senilai Rp 45 juta, dan tahap ketiga pada 25 April 2013 sebesar Rp 45 juta. Namun, setelah dana turun ke rekening kelompok tani Mekar Sari, justru dikelola sendiri oleh tersangka untuk berternak di lahan miliknya. Anggota kelompok yang berjumlah 13 orang, kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Tabanan. Tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (kmb28)

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 14